

INDEF POLICY BRIEF No. 3/2023

**DAMPAK SUBSIDI BBM DAN LPG 3 KG TERHADAP KEMISKINAN
NELAYAN**

Mei 2023

Muhammad Rizal Taufikurahman¹, Ade Holis², Ade Jamal Mirdad³, Dradjad H. Wibowo⁴, Tauhid Ahmad⁵¹ Kepala Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)² Dosen IPB University³ Dosen BINUS University⁴ Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)⁵ Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada tahun 2022, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp149.365,3 miliar atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Subsidi dan kompensasi energi diberikan sebagai akibat kenaikan harga energi bertujuan untuk menjaga agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan, termasuk nelayan. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah menganalisis dampak subsidi BBM dan Gas 3 Kg terhadap kemiskinan nelayan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis model microsimulation dengan menggunakan data dasar SUSENAS Maret 2022. Secara nasional, dampak kebijakan subsidi BBM mampu menjaga sekitar 5,7 juta orang setara dengan 2,10 persen penduduk Indonesia untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Sebanyak 198 ribu penduduk diantaranya berasal dari keluarga nelayan. Adapun dampak Subsidi LPG 3 KG secara empiris terbukti mampu menyelamatkan sekitar 6,9 juta rumah tangga untuk tidak jatuh miskin dan sekitar 264 ribu orang, atau sekitar 3 persen berasal dari nelayan. Meski demikian, ketepatan sasaran distribusi subsidi energi secara keseluruhan baik subsidi BBM maupun LPG 3 KG yaitu sebesar 34.5 persen, sedangkan sisanya distribusi terjadi ketidaktepatan sasaran. Ketidaktepatan sasaran yang sebesar 65.5 persen atau setara dengan Rp 86.24 triliun yang mayoritas dinikmati oleh pengeluaran rumah tangga desil 5-10, yakni masuk ke rumah tangga mampu. Karena itu ke depan, subsidi energi seyogyanya masih diperlukan kepada sasaran yang tepat terutama bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti rumah tangga nelayan. Selain itu perlu perbaikan, mulai dari pendataan yang dapat berbasis NIK dan alamat (*by name by address*) hingga pada level audit anggaran serta perlunya perbaikan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung berdasarkan harga keekonomian.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19, menunjukkan tren yang semakin membaik. Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi semakin impresif di setiap triwulan pada tahun 2022. Misalnya dari triwulan I-III 2022 dimulai dengan pertumbuhan ekonomi ekspansif sebesar 5.01 persen, 5.44 persen, dan 5.72 persen. Seiring dengan semakin impresif dan tumbuhnya kinerja ekonomi yang kian membaik, gejolak inflasi global yang dipicu kenaikan harga-harga pangan dan energi akibat

perang Ukraina-Rusia menjadi momok bagi banyak negara. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan pangan dan energi dalam negeri.

Sebagai respon atas kebijakan subsidi pangan dan energi, khususnya gejala harga pangan dan energi, berimplikasi terhadap capaian dan target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam APBN. Dimana pemerintah mengambil pilihan kebijakan fiskal dengan melakukan penyesuaian harga energi, baik berasal dari BBM maupun dari LPG 3 kg. Hal ini dilakukan guna menjaga prudensitas fiskal dalam melakukan pembiayaan pembangunan agar sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan.

Secara umum, subsidi energi di Indonesia terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu, subsidi LPG tabung 3 kg, serta subsidi listrik. Subsidi tersebut pada dasarnya merupakan transfer dana dari pemerintah yang membuat harga suatu barang atau jasa menjadi lebih murah. Untuk melakukan penyesuaian harga energi yang dikonsumsi oleh masyarakat, pemerintah membayar sejumlah dana tertentu kepada Badan Usaha baik dalam bentuk perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga sesuai realisasi volume penggunaan energi yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada periode tahun 2018–2021 realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif, hal ini dipengaruhi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar. Selama kurun waktu tersebut, subsidi energi berfluktuasi dari semula sebesar Rp153.522,4 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp140.395,2 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, subsidi energi diperkirakan mengalami peningkatan menjadi Rp208.928,4 miliar.

Realisasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg selama kurun waktu tahun 2018–2021 mengalami fluktuasi dari semula Rp 97.014,8 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp83.787,2 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg diperkirakan mencapai Rp149.365,3 miliar atau menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Penyaluran subsidi energi ini masih penting untuk dilakukan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat agar tetap dapat menopang kualitas pertumbuhan ekonomi. Terutama bagi masyarakat miskin, rentan miskin, nelayan dan UMKM. Subsidi dan kompensasi harga energi memiliki peran agar beban hidup masyarakat miskin tidak semakin berat serta menjaga masyarakat yang tadinya tidak miskin untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan, khususnya akibat dari kenaikan harga energi. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah menganalisis dampak kebijakan subsidi BBM dan Gas LPG 3 kg terhadap kemiskinan nelayan.

PENDEKATAN DAN METODE

Studi dampak subsidi BBM dan LPG 3 kg terhadap kemiskinan nelayan ini menggunakan dua pendekatan utama, kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan analisis *microsimulation* dan pengolahan datanya dilakukan menggunakan *software* STATA dan *Microsoft Excel*. Data dasar yang digunakan untuk analisis *microsimulation* ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Masyarakat (SUSENAS) Maret 2022 yang dipublikasikan oleh Bdan Pusat Statistik (BPS). Adapun untuk pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis deksriptif kualitatif

berdasarkan hasil FGD dan diskusi mendalam dengan berbagai *stakeholders*. Peranan Subsidi terhadap kemiskinan dihitung berdasarkan selisih jumlah orang miskin Ketika Harga BBM dan LPG dengan subsidi dibandingkan dengan Ketika Harga BBM dan LPG tanpa subsidi. Adapun skenario simulasi yang dilakukan adalah (1) Kenaikan harga LPG 3 kg dengan subsidi, (2) Kenaikan harga LPG 3 kg tanpa Subsidi, (3) Kenaikan harga BBM dengan subsidi, dan (4) Kenaikan harga BBM tanpa subsidi.

GARIS KEMISKINAN DAN KEMISKINAN NELAYAN

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Masyarakat miskin itu sendiri adalah satu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni sandang atau pakaian, pangan atau makanan dan papan atau tempat tinggal. Kemiskinan nelayan didefinisikan sebagai rumah tangga nelayan yang didekati oleh rumah tangga yang anggota rumah tangganya bekerja di sektor perikanan.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat menjalani kehidupan yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Oleh karena itu, GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Adapun Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

STRUKTUR KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN

Secara nasional, tingkat kemiskinan yang terjadi di keluarga nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga non nelayan dimana tingkat kemiskinan di rumah tangga nelayan adalah sebesar 12,3 persen sedangkan tingkat kemiskinan bukan keluarga nelayan adalah 9,4 persen. Dari 9,8 juta penduduk dari keluarga nelayan, 1,1 juta (12,3 %) diantaranya tergolong kedalam kelompok penduduk miskin. Adapun untuk keluarga non nelayan terdapat sekitar 25,1 juta orang yang masuk dalam kategori miskin dari total 265,4 juta penduduk dengan kategori bukan keluarga nelayan. Dengan kata lain, terdapat sekitar 9,4 persen penduduk dari rumah tangga non nelayan yang berada dibawah garis kemiskinan.

Adapun di level provinsi, daerah yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah provinsi Papua, dimana 26,6% penduduknya masuk dalam kategori miskin. Dari kelompok rumah tangga nelayan, provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan keluarga nelayan tertinggi, dimana lebih dari separuh (52,9%) penduduk yang berasal dari keluarga nelayan masuk dalam kategori miskin. Dari sisi jumlah, penduduk termiskin terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur, dimana terdapat sekitar 4,2 juta penduduknya masuk dalam kategori miskin. Dari 4,2 juta penduduk miskin di Jawa Timur, lebih dari 84 ribu orang diantaranya adalah penduduk yang masuk dalam kategori keluarga nelayan. Sementara itu, keluarga nelayan yang porsi kemiskinannya paling rendah terdapat di wilayah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, dimana tingkat kemiskinan nelayan di kedua wilayah tersebut masing-masing sebesar 1,0 persen dan 1,2 persen.

DAMPAK SUBSIDI BBM DAN LPG 3 KG TERHADAP KEMISKINAN NELAYAN

Perubahan harga BBM dan LPG 3 kg, akan sangat berdampak bagi mereka yang menggunakan kedua jenis komoditas tersebut dalam kehidupan kesehariannya. Menjadi sangat penting untuk memetakan bagaimana pola penggunaan BBM dan LPG 3 kg yang dilakukan oleh rumah tangga yang ada di Indonesia.

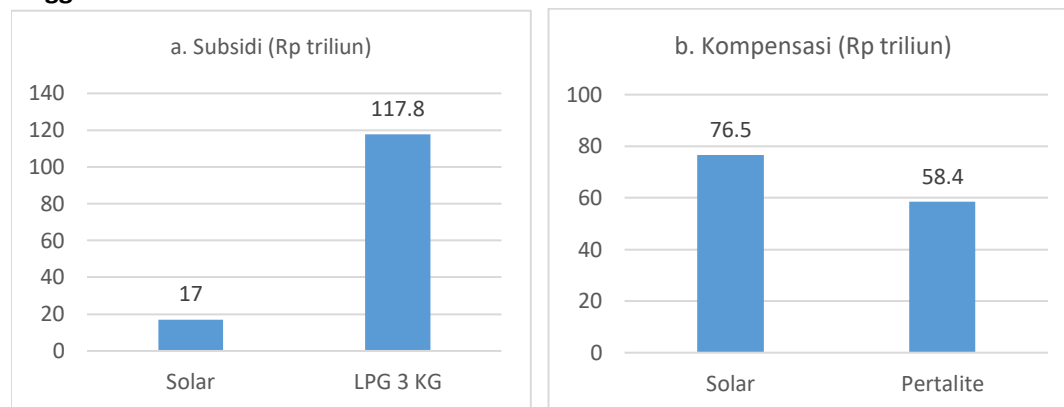
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan data SUSENAS Maret 2022, dari total 72,9 juta rumah tangga di Indonesia, terdapat 59,4 juta rumah tangga yang menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak serta terdapat sekitar 62,1 juta rumah tangga pengguna BBM untuk transportasi. Dari 62,1 juta rumah tangga pengguna BBM, dapat dirinci bahwa terdapat sekitar 61,97 juta rumah tangga pengguna bensin (pertalite, pertamax dan pertamax turbo) dan 831 ribu rumah tangga pengguna solar. Dengan mengelompokkan rumah tangga Indonesia berdasarkan rata-rata pengeluaran individu per bulannya kedalam sepuluh kelompok pengeluaran, dimana kelompok 10 persen pertama (Desil 1) merupakan kelompok masyarakat termiskin, dan 10 persen kelompok masyarakat terkaya dikategorikan sebagai Desil 10, maka dapat dipetakan siapa saja pengguna gas LPG 3 kg dan BBM yang beredar di pasaran. Dengan mengacu pada Pasal 7, ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang energi menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, maka sejatinya subsidi diberikan kepada mereka yang berhak dengan kategori tidak mampu secara ekonomi. Dengan menggunakan perbandingan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, maka mereka yang dianggap target penerima program penanggulangan kemiskinan dan subsidi adalah kelompok masyarakat miskin dan tidak miskin yang secara statistik digolongkan kedalam 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah (Desil 1 sampai Desil 4).

Dari total jumlah rumah tangga yang mengkonsumsi energi bersubsidi, jumlah rumah tangga yang bukan merupakan target penerima subsidi (Desil 5 – Desil 10) porsinya lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang menjadi sasaran penerimaannya. Dari total 59,4 juta rumah tangga pengguna LPG 3 kg, sebanyak 36,3 juta (60,7%) diantaranya berasal dari kelompok menengah keatas (Desil 5 – Desil

10). Disisi lain, jumlah rumah tangga pengguna BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite juga secara proporsional lebih banyak berasal dari kelompok bukan target penerima subsidi. Sebanyak 81,3 persen (676 ribu) rumah tangga pengguna solar dan 55,6 persen (28,5 juta) rumah tangga pengguna pertalite berasal dari kelompok rumah tangga Desil 5 s.d Desil 10. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan subsidi energi.

Dengan mengacu pada data publikasi Nota Keuangan APBN 2023 yang dirilis kementerian keuangan, jumlah volume BBM bersubsidi yang dikonsumsi oleh rumah tangga mencapai sekitar 17 juta kilo liter per tahun untuk solar, 32,56 juta kilo liter tahun untuk pertalite dan 8 juta ton untuk LPG 3 KG per tahun. Berdasarkan pada volume BBM tersebut maka diperkirakan jumlah subsidi yang akan disalurkan adalah sebesar Rp 17 triliun per tahun untuk solar dan Rp 117,8 triliun per tahun untuk LPG 3 KG. Sementara itu, besaran kompensasi untuk solar lebih besar lagi dibandingkan subsidiya yaitu sebesar Rp 76,5 triliun per tahun, besaran kompensasi pertalite mencapai Rp 58,4 triliun pertahun (Gambar 1).

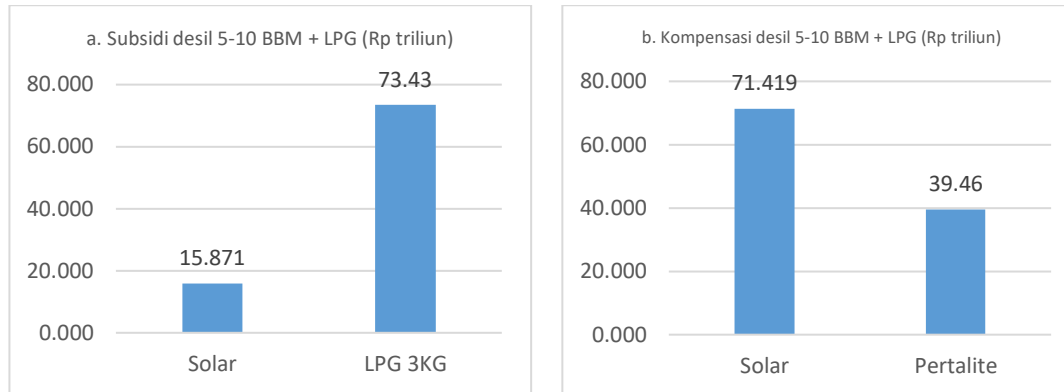
Gambar 1. Besaran Subsidi dan Kompensasi BBM per Tahun Berdasarkan Asumsi APBN Tahun Anggaran 2023



Sumber: Nota Keuangan 2023

Dengan melakukan pemetaan terhadap pola penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kg berdasarkan kelompok target penerima dan bukan target penerima subsidi, maka nilai subsidi energi yang tepat sasaran (subsidi energi baik subsidi BBM maupun LPG 3 KG) diperkirakan sekitar 34.5 persen, sedangkan sisanya diindikasikan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran sebesar 65.5 persen atau setara dengan Rp 86.24 triliun yang mayoritas dinikmati oleh rumah tangga dengan kategori Desil 5-10, yakni masuk ke rumah tangga menengah keatas (mampu). Adapun secara terperinci ketidaktepatan sasaran tersebut untuk subsidi gas LPG 3 KG sebesar 62.3 persen, dan untuk BBM sebesar 67.78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini subsidi energi sangat rentan dengan ketidaktepatan sasaran penerima, terutama rumah tangga yang tergolong ke dalam rumah tangga mampu. Termasuk dalam hal ini rumah tangga nelayan.

Gambar 2. Besaran Ketidaktepatan penyaluran Besaran Subsidi dan Kompensasi BBM per Tahun Berdasarkan Asumsi APBN TA 2023



Sumber: Estimasi Penulis

Selain adanya ketidaktepatan sasaran dari bukan target penerima subsidi BBM dan LPG 3 kg yang menikmati subsidi yang diberikan pemerintah, ketidaktepat sasaran juga terjadi bagi mereka yang menjadi target penerima subsidi, tapi mereka tidak menikmatinya. Fokus pada rumah tangga nelayan, proporsi Rumah Tangga Nelayan yang tidak menikmati Subsidi BBM dan LPG 3 kg di kelompok Desil 1 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Rumah tangga Bukan Nelayan. Selain itu, sekitar 44,1 % rumah tangga Nelayan Miskin ekstrem Indonesia tidak menikmati subsidi LPG 3KG, dan 50,7 % rumah tangga Nelayan Miskin ekstrem Indonesia tidak menikmati subsidi BBM. Distribusi pengguna LPG 3 kg dan BBM berdasarkan kelompok pengeluaran dan kelompok rumah tangga “Nelayan vs Bukan Nelayan” menunjukkan bahwa sekitar 257 ribu (26%) rumah tangga Nelayan dengan kategori miskin dan rentan miskin tidak menikmati Subsidi LPG 3 kg, dan 253 ribu (25%) rumah tangga Nelayan dengan kategori miskin dan rentan miskin tidak menikmati Subsidi BBM. Cukup besarnya jumlah rumah tangga nelayan miskin ekstrem yang tidak menikmati Subsidi BBM dapat mencerminkan adanya fenomena puncak gunung es terkait efektivitas penegakan hukum dan pengawasan.

Adapun pola pengeluaran BBM dan LPG 3 KG rumah tangga nelayan dan bukan nelayan berdasarkan kelompok pengeluaran dimana rata-rata pengeluaran konsumsi BBM dan LPG 3 KG bahwa rumah tangga nelayan kelompok miskin dan rentan miskin cenderung lebih tinggi dibandingkan keluarga bukan nelayan. Namun untuk kelompok rumah tangga menengah keatas rata-rata konsumsi rumah tangga nelayan untuk BBM cenderung lebih rendah.

Meskipun dalam implementasinya subsidi BBM dan subsidi LPG 3 kg menghadapi fenomena ketidaktepatan sasaran, namun subsidi kedua komoditas tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil simulasi menggunakan analisis *microsimulation* menunjukkan bahwa secara nasional, dampak kebijakan subsidi BBM mampu menjaga sekitar 5,7 juta orang (2,10%) penduduk untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan. Sebanyak 198 ribu penduduk diantaranya berasal dari keluarga nelayan. Artinya akan ada tambahan sekitar 5,7 juta orang miskin baru jika subsidi dan kompensasi BBM dicabut. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Jawa

Timur akan menjadi Provinsi yang jumlah kemiskinan-nya naik paling banyak jika subsidi dan kompensasi BBM dihapus. Diperkirakan sekitar 1,1 juta penduduknya (2,8%) yang akan jatuh ke jurang kemiskinan.

Selanjutnya dampak Subsidi LPG 3 kg secara empiris terbukti mampu menyelamatkan sekitar 6,9 juta rumah tangga untuk tidak jatuh miskin. Kelompok Rumah tangga Nelayan yang terselamatkan dari dari ancaman kemiskinan akibat adanya kebijakan pencabutan subsidi LPG 3 kg adalah sekitar 264 ribu orang, atau sekitar 3 persen dari total penduduk yang menggantungkan hidupnya dari aktifitas nelayan. Jika subsidi LPG diadakan, sekitar 4 juta penduduk Jawa akan jatuh miskin, dan jumlah paling besar adalah Provinsi Jawa Timur.

Dengan mengasumsikan bahwa harga BBM naik tapi masih mengandung Subsidi, maka jumlah orang miskin secara nasional akan mengalami kenaikan sebanyak 2,8 juta orang, dimana jumlah ini terdiri dari 99 ribu orang yang berasal dari keluarga nelayan, dan 2,7 juta orang dari keluarga non nelayan. Sebelum kenaikan harga BBM, jumlah orang miskin di seluruh BBM adalah sebanyak 26,16 juta orang yang terdiri dari 1,07 juta orang yang berasal dari keluarga nelayan dan sisanya (27,73 juta orang) adalah bukan keluarga nelayan. Setelah kenaikan harga BBM yang masih mengandung subsidi, jumlah penduduk miskin dari keluarga nelayan naik menjadi 1,19 juta orang, dan jumlah penduduk miskin dari bukan keluarga nelayan naik menjadi 27,74 juta orang, atau secara keseluruhan jumlah orang miskin menjadi 28,92 juta orang. Dalam hal ini, jumlah orang miskin secara keseluruhan naik sebanyak 2,8 juta orang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah:

1. Dalam implementasinya, subsidi energi (BBM dan LPG 3 kg) masih banyak dinikmati oleh mereka yang dianggap “mampu” dan bukan menjadi target penerima subsidi sesuai amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi.
2. Subsidi energi seyogyanya masih diperlukan dan tetap diberikan kepada sasaran yang tepat terutama bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, seperti rumah tangga nelayan.
3. Perlu dilakukan pengawalan dalam prioritas sasaran terutama untuk kelompok nelayan, mulai dari pendataan hingga pada level audit anggaran. Sehingga efektifitas pelaksanaan subsidi, tidak hanya level makro tetapi sampai level teknis pendistribusian.
4. Perlunya perbaikan kebijakan subsidi LPG 3 kg dimana harus dilakukan perbaikan dari subsidi barang menjadi subsidi langsung berdasarkan harga keekonomian.
5. Secara umum perlu dilakukan perbaikan mekanisme distribusi subsidi terutama berkaitan dengan masalah ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilakukan melalui verifikasi data hingga level desa. Data tersebut dapat berbasis NIK dan alamat (*by name by address*) terutama dalam menyalurkan subsidi BBM dan LPG 3 kg.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, S. A., A.S. Olomola., T.O. Oni., B.W. Adeoye. 2009. Impact of Price Changes on Poverty: The Nigerian Experience. The Nigerian Institute of Social and Economic Research.
- Al Izzati, Ridho, Asri Yusrina, and Asep Suryahadi (2023) 'Estimating the Effect of a Fuel Price Increase on Poverty and Inequality: Evidence from a Fuel Subsidy Reduction in Indonesia.' Research Note No. 1. Jakarta: The SMERU Research Institute <<https://smeru.or.id/en/publication/estimating-effect-fuel-price-increase-poverty-and-inequality-evidence-fuel-subsidy>> [access date].
- Aziz, J. 2002. Poverty Dynamics in Rural India. IMF Working Paper, Asia and Pacific Department.
- Azzoni, C., J. Guilhoto., E. Haddad., T. Manenez., F. Silveira., 2004. Commodity Price Changes and Their Impacts on Poverty in Developing Countries: the Brazilian Case.
- Cardoso, E. 1992. "Inflation and Poverty". Georgetown University - Edmund A. Walsh School of Foreign Service (SFS), NBER Working Paper No. W4006.
- Cloutier MH, Cockburn J. 2002. How to Build an Integrated CGE Microsimulation Model Step-by-Step Instructions with an Illustrative Exercise. CIRPEE, Université Laval
- Cockburn et al. 2008. Trade Liberalization and Poverty: A CGE Analysis of the 1990s Experience in Africa and Asia. Copyright © Poverty and Economic Policy (PEP) Research Network
- Cockburn J. 2001. Trade Liberalization and Poverty in Nepal: A Computable General Equilibrium Micro Simulation Analysis. CREFA, jcoc@ecn.ulaval.ca
- Davies JB. 2009. Combining Microsimulation with CGE and Macro Modelling for Distributional Analysis in Developing and Transition Countries. International Journal of Microsimulation (2009) 49-65
- Deaton, A. 1989. "Rice prices and income distribution in Thailand: a non-parametric analysis." Economic Journal. 99 (Conference):1-37.
- Deaton, A. 1997. The Analysis of Household Surveys. A Microeconomic Approach to Development Policy. Baltimore and Washington DC: The World Bank and Johns Hopkins University Press.
- Desus, S., S. Herera, and R. D. Hoyos. 2008. The Impact of Food Inflation on Urban Poverty and Its Monetary Cost: Some Back of the Envelope Calculations. Development Economics Vice Presidency, The World Bank.
- Easterly, W. and Fischer, S. 2001. "Inflation and the poor." Journal of Money, Credit and Banking 33 (2, Part 1): 160-78.
- Easterly, W. and Fischer, S. 2004. Inflation and the Poor. New York University - Stern School of Business, Department of Economics and Bank of Israel. World Bank Policy Research Working Paper No. 2335.
- Effendi, Yuventus (2014). The Impact of Fuel Subsidy Reallocation: The Social Accounting Matrices Approach. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2, Desember 2014 131 – 143
- Forgha, G and Njimanted. 2006. Econometric Model of Poverty in Cameroon: A System Estimation Approach. International Review of Business Research Papers. University of Buea, Department of Economics and Management, Faculty of Social and Management Sciences, South West Province of Cameroon, 2: 30-46.
- Foster et al. 1984. Notes and Comments a Class of Decomposable Poverty Measures. Econometrica 52, 761–776

- Gini C. 1921. Measurement of Inequality of Incomes. *The Economic Journal*, Vol. 31, No. 121 (mar., 1921), pp. 124-126
- Ivanic, M., and W. Martin. 2008. Implication of Higher Global Food Prices for Poverty in Low-Income Countries. *World Bank Policy Research Working Paper No. 4594*.
- Kakwani, N and H. H. Son. 2006. Measuring The Impact of Price Changes on Poverty. *International Poverty Centre, United Nations Development Programme*.
- Oktaviani, Rina dan Sahara .2005. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Ekonomi Makro dan Keragaan Ekonomi Sektoral dan Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol 1 No 3 April 2005 : 35-52
- Son, H, N. Kakwani (2009). Measuring the impact of price changes on poverty. *The Journal of Economic Inequality* volume 7, pages395–410 (2009)
- Sugema, Iman, Toni Irawandan , Ade Holis, Deniey Adi Purwanto dan Toni Bakhtiar (2010). The Impact of Inflation on Rural Poverty in Indonesia: an Econometrics Approach. *International Research Journal of Finance and Economics*.
- Sulaiman, M Harun, dan AA Yusuf (2022). Impacts of Fuel Subsidy Rationalization on Sectoral Output and Employment in Malaysia. *Asian Development Review*, Vol. 39, No. 1, pp. 315–348